

**THE STUDY OF CREDIT ALLOCATION FOR SMALL ENTERPRISES
(KUK) BY THE BANKING AND ITS INFLUENCE TOWARD
THE PERFORMANCE OF THE REGIONAL ECONOMY
IN THE WEST SUMATRA ¹⁾**

Niki Lukviarman ²⁾

ABSTRACT

Credit distribution to various small enterprises based on certain economic sector, is expected to motivate the enterprising activities which are financed to be more productive one of forms of the widely known credit is small enterprise credit. The KUK existence is expected to be the accelerator for regional economy development.

Besides, in general, the economy performance is measured by the application of the Gross Regional Domestic Product, namely, the higher the PDRB growth of one region, it can be said that the regional economy performance is relatively better. The problem is how big the influence of the KUK distribution toward the economy performance in one region. By using the data in 1993-1997, it can be recognized that the average economy growth in the West Sumatra is 7,33% where the dominant sector is electricity, natural gas and drinking water, mining and processing industries. Relatively bigger distribution of the KUK is the sectors of trade, restaurant, hotel, transportation, warehousing, communication, etc.

Empirical finding result indicates that the composition of the KUK distribution is significantly influential toward the economy performance of the West Sumatra, however, there are other variables which affect the capability of the small enterprises in supporting the whole economy performance, among others the marketing of production items, the raw material availability and skill of small entrepreneurs in the business management.

In the future, it is expected that the allocation and composition of the KUK distribution can be adapted and synergies with the strategic plan of the regional development in the West Sumatra as well as small regions below it in order to reach optimum result into the realization of the developmental targets which have been planned.

1) Financed by Research Project and Applied Knowledge Research with the Research Implementation Document No. : 005/LIT/BPPK/SDM/III/2001

2) Lecturing Staff of the Accounting Department, Economics Faculty Andalas University.

I. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga perantara antara unit surplus dan unit defisit di dalam suatu sistem perekonomian, perbankan memegang peranan penting dalam menunjang aktifitas perekonomian nasional. Dengan memanfaatkan jasa perbankan masyarakat dapat melakukan aktifitas ekonomi secara lebih optimal, terutama dengan semakin beragamnya produk yang ditawarkan. Namun demikian keberadaan lembaga yang beroperasi berdasarkan kepercayaan ini, sangat ditentukan sisi permintaan atas berbagai produk yang mampu dihasilkannya dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Keberadaan bank di suatu daerah tidak terlepas dari terdapatnya peluang untuk memanfaatkan potensi daerah yang bersangkutan untuk kepentingan bank tersebut. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi potensi keberadaan bank di suatu daerah tertentu, terutama dipengaruhi oleh besaran aktifitas ekonomi yang terdapat di lingkungan wilayah tersebut. Besaran aktifitas ekonomi tersebut juga akan dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, seperti ; kegiatan ekonomi, jumlah penduduk, pendapatan perkapita serta ketersediaan sarana dan prasarana disamping berbagai faktor lainnya yang relevan.

Salah satu bentuk kredit diberikan oleh perbankan adalah berupa Kredit Usaha Kecil (KUK) yang ditujukan untuk perberdayaan ekonomi usaha kecil. Melalui penyaluran kredit kepada berbagai usaha kecil berdasarkan sektor ekonomi tertentu, diharapkan kegiatan usaha perusahaan yang dibiayai menjadi semakin produktif. Akhirnya penyaluran KUK dimaksud, diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap perkembangan perekonomian daerah dimana perusahaan tersebut berada.

Dengan demikian kinerja perekonomian daerah dapat produktifnya berbagai unit usaha di daerah tersebut.

Banyak KUK yang disalurkan oleh perbankan. Sesuai a dapat dibedakan menjadi Kredit Investasi (KI), Kredit Modal Kerja Konsumtif (KK). Dua jenis yang pertama diharapkan dapat digunakan produktif sehingga dapat memberikan nilai tambah pada kegiatan usaha. S jenis kredit konsumtif diharapkan mampu menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah. Dengan meningkatnya permintaan terhadap suatu barang atau jasa pada daerah tertentu, diharapkan roda perekonomian dapat berputar secara lebih baik sehingga dapat merangsang tumbuhnya investasi baru. Pada akhirnya pemberian kredit konsumtif juga akan ikut mampu memberikan kontribusi pada perekonomian daerah melalui terjadinya peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dalam perekonomian.

Untuk mengetahui secara lebih jauh besarnya alokasi kredit usaha kecil oleh perbankan untuk daerah Sumatera Barat dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah yang bersangkutan, diperlukan adanya penelitian yang bersifat komprehensif. Dalam penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan peta alokasi KUK yang diberikan oleh perbankan di daerah Sumatera Barat. Secara lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sektor-sektor penyaluran KUK serta bagaimana perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir. Lebih lanjut melalui penelitian ini juga diharapkan dapat diidentifikasi pengaruh penyaluran KUK dimaksud terhadap kinerja sektor-sektor perekonomian di daerah dimana kredit tersebut disalurkan.

II. PERUMUSAN MASALAH

Alokasi kredit pada usaha yang bersifat produktif di setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah. Secara relatif kinerja perekonomian daerah tersebut dapat diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena penelitian ini dimaksudkan untuk menilai besarnya pengaruh alokasi KUK di setiap sektor perekonomian daerah Sumatera Barat terhadap PDRB, diharapkan dapat digambarkan kontribusi KUK untuk setiap sektor ekonomi daerah Sumatera Barat.

Secara lebih spesifik, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup :

1. Bagaimana alokasi dan jumlah KUK yang telah disalurkan oleh lembaga perbankan untuk setiap sektor ekonomi di Sumatera Barat.
2. Bagaimana perkembangan alokasi KUK oleh perbankan di Sumatera Barat menurut sektor ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.
3. Bagaimana hubungan antara alokasi KUK untuk setiap sektor ekonomi dengan PDRB Sumatera Barat.
4. Apakah terdapat hubungan yang berarti antara besarnya jumlah KUK yang disalurkan dalam suatu sektor ekonomi dengan kinerja setiap sektor perekonomian tersebut.

III. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kredit Usaha Kecil

Penggunaan dana oleh bank dapat dibedakan menjadi empat bahagian (Dahlan; 1995,78) yaitu : untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit dan investasi. Penyaluran kredit kepada nasabah yang memenuhi ketentuan kebijaksanaan perkreditan suatu bank, merupakan prioritas penggunaan dana ketiga oleh suatu bank. Namun demikian penyaluran dana melalui kredit ini merupakan kegiatan utama dari suatu bank, karena melalui aktifitas ini bank akan memperoleh pendapatan.

Menurut UU No. 78 Tahun 1982 tentang perbankan, kredit dimaksudkan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Siamat; 1995,96).

Di dalam prakteknya terdapat berbagai jenis kredit yang dapat diberikan oleh bank, diantaranya adalah kredit untuk usaha kecil dan koperasi dengan tujuan untuk pengembangan usaha kecil dan koperasi (Bank Indonesia; 1981,1). Kredit dengan katagori demikian dapat dibedakan menjadi (a) kredit program, (b) pinjaman penerusan (*two step loan*) dan (c) bantuan teknis serta (d) kebijakan kredit usaha kecil dan lain-lain. Masing-masing jenis kredit tersebut berbeda dalam mekanisme pemberiannya serta nasabah yang dapat menerimanya.

Salah satu kredit yang dianggap mempunyai kontribusi cukup besar dalam pemberdayaan usaha kecil dan koperasi adalah jenis keempat dari katagori diatas dan merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil. Tujuan pemberian kredit

ini adalah sebagai bantuan pendanaan bagi usaha kecil dalam membiayai aktifitas usahanya (Bank Indonesia, 1998,85). Dengan demikian, pemberian kredit ini meliputi pemberian pembiayaan modal kerja dan investasi seperti rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi usaha dan atau pendirian usaha baru.

Di dalam prakteknya pemberian KUK kepada perusahaan diberlakukan oleh bank pelaksana pemberi pinjaman sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. Diantara persyaratan spesifik yang membedakan antara KUK dengan jenis kredit perbankan lainnya adalah (a) memiliki kekayaan bersih maksimum Rp 200 juta atau (b) memiliki hasil penjualan tahunan maksimum Rp 1 milyar, (c) usaha yang akan dibiayai adalah milik WNI dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar serta (d) berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Perolehan KUK oleh badan usaha sesuai dengan kriteria usaha dan badan usaha yang dapat menerimanya, dimaksudkan untuk kegiatan produktif usaha yang bersangkutan. Dengan diperolehnya sumber pembiayaan tersebut, pihak perusahaan dapat melakukan investasinya dalam bentuk barang modal (aktiva tetap) ataupun modal kerja (persediaan) didalam menjalankan aktifitas usahanya. Dengan adanya sumber pembiayaan ini, maka keterbatasan pembiayaan yang dihadapi perusahaan dapat diatasi sehingga berdampak akhir pada peningkatan produktifitas usaha perusahaan.

2. *Perekonomian Nasional dan Daerah*

Setiap investasi yang dilakukan oleh perusahaan membutuhkan sumber pembiayaan dan diantaranya dapat diperoleh melalui perbankan. Secara ekonomi, investasi memainkan dua peran dalam menentukan jumlah output dan pendapatan (Samuelson, 1994,173). Dengan demikian hasil investasi akan mempengaruhi pendapatan nasional dan daerah, sehingga ikut menentukan kinerja perekonomian daerah yang pada akhirnya akan mempengaruhi perekonomian nasional.

Untuk menilai output yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu, dapat digunakan ukuran Produk Nasional Bruto/PNB. Dalam perhitungan ini output atau pendapatan nasional yang diukur adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Sadono; 1994,34). Hal ini juga berlaku untuk mengukur kinerja perekonomian berbagai daerah dalam suatu negara, yang biasanya diukur dengan Produk Regional Bruto.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini konsep output dan pendapatan yang akan diukur adalah untuk daerah regional Sumatera Barat, sehingga konsep penilaian kinerja perekonomian yang relevan digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Kredit Usaha Kecil yang disalurkan oleh perbankan di Sumatera Barat adalah untuk wilayah regional Sumatera Barat dan bidang usaha yang dilakukan oleh warga negara. Oleh karena itu indikator PDRB dapat digunakan sebagai ukuran prestasi/kinerja perekonomian.

Hasil usaha perusahaan sebagai unit mikro dalam satu sistem perekonomian akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian itu sendiri secara umum. Hal ini tergambar dari kenyataan bahwa investasi merupakan bahagian dari pendapatan nasional

yang dapat digunakan untuk keperluan penambahan mesin-mesin baru, penggantian peralatan atau mesin lama dan pembiayaan perubahan cadangan (*inventory*) perusahaan (Syahrudin, 1992, 71). Dengan demikian hasil investasi akan ikut mempengaruhi pendapatan suatu daerah sebagai bahagian dari pendapatan nasional.

Sebagaimana diketahui, perusahaan atau usaha kecil dan koperasi yang memperoleh fasilitas KUK, bergerak dalam berbagai bidang usaha atau sektor perekonomian. Dengan demikian kontribusi antara perusahaan sebagai unit mikro dalam suatu sistem perekonomian yang bergerak dalam suatu sektor ekonomi tertentu, akan tergambar di dalam kinerja perekonomian sektor tersebut di dalam struktur pendapatan nasional maupun daerah.

Hasil Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan hasil penelitian "*Baseline Economic Survey*" Propinsi Sumatera Barat, penyaluran KUK di Sumatera Barat oleh perbankan mengalami peningkatan yang berarti dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1992. Lonjakan besar ini terjadi karena adanya kebijaksanaan pemerintah berupa ketentuan yang mengatur agar 20% dari kredit yang diberikan oleh perbankan, disalurkan pada kelompok usaha kecil dan koperasi (PUA, 1994, 84).

Lebih lanjut, penelitian tersebut juga mengindikasikan peta alokasi KUK oleh perbankan berbeda untuk setiap sektor ekonomi. Data tahun 1992 memperlihatkan bahwa penerima KUK yang terbesar adalah sektor Restoran/Perdagangan/Hotel, kemudian diikuti oleh sektor pengangkutan dan jasa-jasa. Lebih lanjut berdasarkan jaminan yang diberikan, data tahun 1992 menunjukkan bahwa Bank pemerintah

merupakan bank pemberi KUK yang terbesar kemudian diikuti oleh Bank Pembangunan Daerah (LPUA,1994,86)

Studi tersebut tidak menyatakan secara eksplisit kontribusi KUK terhadap kinerja perekonomian daerah. Namun mengingat potensi dunia usaha Sumatera Barat dimana terlihat dominasi yang cukup besar dari kelompok usaha kecil dan informal, maka proporsi pemberian KUK secara relatif akan meningkat bila dibandingkan dengan total pemberian kredit secara keseluruhan. Hal ini diantaranya disebabkan oleh perkembangan jumlah unit usaha kecil sebagai potensi pasar sasaran yang akan menyerap KUK serta perkembangan PDRB Sumatera Barat (LPUA;1994,90). Dengan demikian alokasi penyahuran KUK oleh perbankan akan mempunyai dampak terhadap kinerja perekonomian daerah.

4. Alokasi KUK dan Kinerja Perekonomian Daerah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa investasi oleh perusahaan akan mempengaruhi pendapatan nasional dan daerah, yang diukur berdasarkan output dan pendapatan yang dihasilkan. Sementara investasi tersebut, terutama oleh usaha kecil baik formal maupun non formal serta koperasi, memerlukan pendanaan untuk membiayai investasi tersebut yang diantaranya diperoleh melalui kredit berupa KUK. Untuk itu adalah penting untuk meneliti secara lebih lanjut kaitan antara aplikasi pemberian KUK dengan kinerja perekonomian daerah dimana KUK tersebut disalurkan.

Usaha kecil dan koperasi yang memperoleh pendanaan dari KUK bergerak dalam berbagai sektor perekonomian. Oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut alokasi KUK untuk setiap sektor perekonomian dan perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan demikian akan diketahui peta alokasi KUK oleh perbankan di Sumatera Barat dan pengaruhnya terhadap kinerja perekonomian daerah yang bersangkutan.

IV. TUJUAN PENELITIAN

Di dalam sektor perbankan relatif sulit untuk membedakan kegiatan usaha perbankan berdasarkan fungsinya sebagaimana lazim dikenal di dalam praktek, karena semua jenis bank yang dikategorikan berdasarkan fungsinya dapat melakukan fungsi bank umum. Hal ini sesuai dengan pengelompokan bank pasca UU No. 7 Tahun 1992 yang hanya dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pada kenyataannya, dalam kurun waktu terakhir, telah beroperasi lembaga perbankan dengan konsep bagi hasil. Untuk itu dalam penelitian ini, lembaga keuangan yang dijadikan objek penelitian hanya terbatas untuk dua jenis sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1992 dan beroperasi di wilayah Sumatera Barat.

Karena pada paruh waktu tahun 1997 terjadi krisis moneter dan diikuti pada periode berikutnya dengan ekonomi, maka data-data penyahuran KUK mulai dari periode selanjutnya (1998) tidak dapat dijadikan sebagai dasar penelitian. Untuk menghindari bias akibat hal tersebut, maka data-data di dalam penelitian ini akan menggunakan data penyahuran KUK oleh lembaga perbankan dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1997.

Dengan dasar demikian maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mempelajari dan menganalisis alokasi KUK untuk setiap sektor ekonomi yang dibiayai oleh perbankan di Sumatera Barat

2. Mempelajari perkembangan alokasi pemberian KUK oleh lembaga perbankan di Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir sebelum terjadinya krisis ekonomi.
3. Menganalisis hubungan antara jumlah pemberian KUK terhadap sektor ekonomi dalam PDRB Sumatera Barat.
4. Menganalisis hubungan antara jumlah pemberian KUK terhadap kinerja perekonomian daerah Sumatera Barat.

V. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi menyangkut peta alokasi KUK untuk setiap sektor ekonomi di Sumatera Barat dan perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir. Lebih lanjut penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa gambaran pengalokasian KUK menurut sektor ekonomi dan pengidentifikasian sektor ekonomi yang secara relatif memperoleh alokasi kredit dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya.

Karena alokasi KUK dimaksudkan untuk pembiayaan investasi oleh perusahaan, khususnya usaha kecil dan koperasi, maka alokasi tersebut diduga akan membawa pengaruh terhadap kinerja perekonomian daerah. Untuk itu dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh masukan menyangkut hubungan alokasi KUK menurut sektor ekonomi dan pengaruhnya terhadap kinerja perekonomian daerah. Jika terdapat hubungan yang berarti, diharapkan pihak perbankan dapat mempunyai gambaran sektor ekonomi potensial untuk dikembangkan.

Akhirnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya, terutama untuk menilai apakah pola yang sama juga berlaku untuk berbagai daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini dianggap penting karena potensi ekonomi berbagai daerah yang ada di Sumatera Barat relatif berbeda, sehingga pola alokasi KUK untuk setiap daerah tersebut harus berbeda pula.

VI. METODA PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dalam dua tahapan yaitu :

1. Pengumpulan data sekunder untuk mengetahui jumlah dan jenis KUK serta kredit perbankan secara umum yang disalurkan untuk berbagai daerah di Sumatera Barat. Pada tahapan ini, pengumpulan data juga dilakukan untuk mengidentifikasi alokasi KUK berdasarkan sektor ekonomi yang ada berdasarkan pembagian sektor menurut PDRB. Pengumpulan data juga akan dilakukan menyangkut indikator kinerja ekonomi daerah untuk setiap sektor yang dianalisis.
2. Pengolahan dan analisis data untuk merumuskan hasil penelitian menyangkut alokasi serta distribusi KUK berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai. Analisis dilakukan untuk meneliti perkembangan alokasi KUK untuk setiap sektor perekonomian dalam beberapa tahun terakhir. Pada bahagian ini juga akan dilakukan analisis hubungan antara KUK yang disalurkan dengan kinerja perekonomian daerah.

Untuk keperluan analisis, akan digunakan peralatan analisis perbandingan (*comparative analysis*) serta analisis regresi sederhana untuk melihat hubungan antara KUK yang disalurkan dengan kinerja perekonomian daerah. Variabel yang akan dinilai dalam model statistik ini adalah jumlah alokasi KUK untuk Sumatera Barat terhadap sektor perekonomian secara umum, serta variabel PDRB sebagai indikator kinerja perekonomian daerah. Untuk itu, persamaan yang akan digunakan pada analisis regresi adalah sebagai berikut ;

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + u_i$$

Dimana ;

Y_i = PDRB Sumatera Barat menurut sektor

X_i = Alokasi jumlah KUK untuk setiap sektor ekonomi

u_i = variabel error

Model estimasi ekonometrik di atas akan ditaksir dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber dan publikasi, terutama data yang bersumber dari Bank Indonesia. Sementara data yang menyangkut kinerja perekonomian daerah akan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber lainnya yang relevan. Pengelompokan data penelitian akan disesuaikan dengan pola pengelompokan data yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam Statistik Ekonomi - Keuangan Daerah Sumatera Barat.

VII. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Perekonomian Sumatera Barat*

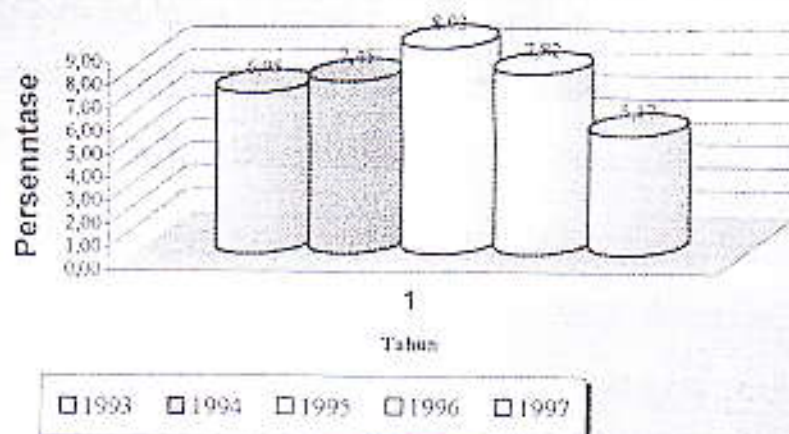
Perekonomian suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya potensi sumber daya yang dimiliki, fasilitas penunjang serta sumber daya dan lokasi daerah yang bersangkutan. Pada bagian ini akan digambarkan bagaimana perkembangan perekonomian Sumatera Barat semenjak tahun 1993 sampai tahun 1997 serta bagaimana perkembangan perekonomian per sektor dan kontribusinya terhadap kinerja perekonomian Sumatera Barat secara umum.

Sumatera Barat, dengan luas wilayah 42.229,64 km² dan terbagi atas 14 daerah kota/kabupaten, memiliki struktur perekonomian yang berbeda dengan struktur perekonomian nasional. Secara nasional, sektor yang sangat berperan dalam pembentukan pendapatan nasional bruto adalah sektor industri sedangkan di Sumatera Barat, dari 9 sektor perekonomian yang ada, sektor yang berperan besar dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB adalah sektor pertanian. Hal ini memungkinkan, karena dari faktor klimatologis wilayah, Sumatera Barat adalah wilayah yang sangat subur dan berpotensi di dalam pengembangan sumber daya pertanian. Oleh karena itu, lebih dari 56% dari luas wilayah keseluruhan, digunakan sebagai lahan budidaya.

Secara umum, pendapatan regional Sumatera Barat selama kurun waktu 1993 - 1997 tumbuh sebesar 7.33% atau tumbuh dari 6 triliun pada tahun 1993 menjadi 7,9 triliun pada tahun 1997. Pertumbuhan secara agregate ini, pada tahun 1993 diikuti oleh pertumbuhan yang hampir merata di seluruh sektor ekonomi yang ada, tetapi lambat laun

mulai terjadi pertumbuhan yang berfluktuasi antara sektor-sektor tersebut. Semenjak tahun 1994 sektor-sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan di atas 10% adalah sektor pertambangan dan galian, industri pengolahan, listrik dan air minum. Beberapa pendorong tingginya pertumbuhan sektor-sektor tersebut adalah *pertama*, meningkatnya produksi Batubara Ombilin sebagai akibat semakin meningkatnya kebutuhan batubara oleh PT. Semen Padang serta semakin meningkatnya permintaan batubara dari luar negeri, terutama dari Jepang dan Malaysia. Pada tahun 1994-1995, nilai tambah yang dapat dihasilkan dari ekspor batu bara adalah US\$ 25,3 juta,- *Kedua*, semakin tumbuhnya industri kecil dan sedang di Sumatera Barat. Dari 9 jenis industri yang terdapat di Sumatera Barat, industri yang berkembang adalah jenis industri makanan dan minuman, industri tekstil, pakaian jadi dan kulit serta industri perkayuan (kayu, rotan, dan bambu). Pada umumnya industri ini dikelola oleh masyarakat (*Home industry*) secara tradisional. *Ketiga*, Meningkatnya permintaan listrik dan air minum dari industri yang sedang tumbuh serta adanya peningkatan wilayah pelayanan dari PLN.

Secara umum, Grafik 1 memperlihatkan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat per tahun semenjak 1993 sampai tahun 1997.



Sedangkan kinerja per sektor perekonomian Sumatera Barat dalam kurun tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Kinerja Perekonomian Sumatera Barat Tahun 1993 - 1997
Berdasarkan harga Konstan 1993

No	Sektor	Pertumbuhan Pada Tahun				
		1993	1994	1995	1996	1997
1	Pertanian	5.85	4.60	7.93	6.99	1.46
2	Pertambangan & Galian	3.47	24.91	19.13	6.19	11.00
3	Industri Pengolahan	9.10	10.29	12.28	11.78	6.23
4	Konstruksi	6.71	17.04	26.19	24.69	25.67
5	Listrik, Gas & Air Minum	5.45	5.07	9.19	9.11	5.06
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	6.84	7.48	6.47	7.30	3.41
7	Angkutan & Komunikasi	7.04	7.69	11.40	8.24	9.98
8	Keuangan, sewa & jasa perusahaan	5.03	6.77	3.26	3.20	2.35
9	Jasa-jasa	9.06	3.47	5.02	5.84	4.09
	Sumatera Barat	6.95	7.45	8.93	7.82	5.17

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka, Beberapa Terbitan

Memasuki PJPT II (Pelita VI) sebelum terjadinya krisis ekonomi, prestasi pembangunan ekonomi yang diraih berdasarkan harga konstan 1993, PDRB Sumatera Barat tahun 1994 sebesar Rp 6.475.855,84 juta, meningkat menjadi Rp 7.996.542,58 juta tahun 1997 dengan pertumbuhan ekonomi 7,45% tahun 1994, 8,34% tahun 1995, tahun 1996 sebesar 8,41% dan tahun 1997 hanya 5,17%

Pada tahun 1993, sektor yang paling besar memberikan sumbangan terhadap PDB adalah sektor pertanian, yaitu sebesar 21,79% kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,06%. Sektor yang paling rendah memberikan sumbangan terhadap total PDB Sumatera Barat adalah sektor listrik, gas dan air minum yang hanya

sebesar 0,91%. Untuk tahun 1994, proporsi kontribusi sektor-sektor perekonomian terhadap PDB Sumatera Barat tidak mengalami pergeseran yang signifikan. Walaupun sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran tetap dominan, tetapi terlihat adanya penurunan kontribusi sebesar 0,78%. Dari 9 sektor perekonomian yang ada, hanya sektor industri pengolahan yang mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDB Sumatera Barat yaitu dari 14,72% menjadi 15,11% atau bergerak dari 8,87 milyar rupiah pada tahun 1993 menjadi 9,78 milyar.

Tidak bergesernya sektor-sektor yang dominan memberikan sumbangan terhadap kinerja perekonomian Sumatera Barat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu (1) Kondisi topografi Sumatera Barat yang sebagian besar adalah wilayah yang sangat subur dan sangat cocok untuk bercocok tanam, sehingga sebagian besar penduduk Sumatera Barat bekerja pada sektor ini, (2) Wilayah Sumatera Barat yang sangat indah menjadikan daerah ini sebagai salah satu daerah tujuan wisata di wilayah Barat Sumatera. Tingginya tingkat kunjungan wisata baik lokal maupun manca negara menyebabkan pertumbuhan hotel, restoran serta perdagangan menjadi meningkat dengan pesat. Dengan potensi yang dimiliki oleh Sumatera Barat ini, pemerintah memprioritaskan pembangunan ekonomi daerah pada dua sektor ini. Secara lebih spesifik, table 2 akan memperlihatkan bagaimana kontribusi sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan domestik bruto di Sumatera Barat.

Tabel 2
 Kontribusi Sektor-Sektor Perekonomian
 Terhadap Pendapatan Domestik Bruto Sumatera Barat Tahun 1993.-1997
 Berdasarkan harga Konstan 1993

No	Sektor	Tahun				
		1993	1994	1995	1996	1997
1	Pertanian	21.79	21.21	21.02	20.85	20.12
2	Pertambangan & Galian	5.30	6.16	6.74	6.64	7.00
3	Industri Pengolahan	14.72	15.11	15.57	16.15	16.31
4	Konstruksi	6.15	6.02	6.03	6.10	6.10
5	Listrik, Gas & Air Minum	0.91	0.99	1.15	1.33	1.59
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	17.06	17.06	16.68	16.60	16.32
7	Angkutan & Komunikasi	11.36	11.39	11.65	11.69	12.23
8	Keuangan, sewa & jasa perusahaan	6.14	6.10	5.78	5.54	5.39
9	Jasa-jasa	16.58	15.96	15.39	15.11	14.95
	PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka, Beberapa Terbitan

Krisis ekonomi yang terjadi di bulan Agustus 1997 telah menyebabkan penurunan yang sangat tajam terhadap kinerja ekonomi daerah, dimana tahun 1998 tercatat pertumbuhan ekonomi *minus* 6,40% dan PDRB perkapita hanya sebesar Rp.1.665.000.- laju inflasi 87,20%, tingkat pengangguran 5,64% dan jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 21,20%.

Pendapatan regional Sumatera Barat pada tahun 1997 adalah sebesar Rp 7,99 triliun, dimana setelah sektor pertanian, sektor yang memberikan sumbangan yang cukup besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 16,32% dan diikuti secara berturut-turut oleh sektor industri pengolahan sebesar 16,31% dan sektor jasa-jasa sebesar 14,95%. Sedangkan sektor yang memberikan sumbangan kecil dari 5% adalah sektor listrik, gas dan air minum yang hanya 1,59%.

Pada tahun 1997, perekonomian Sumatera Barat mengalami penurunan tingkat pertumbuhan dari tahun sebelumnya, yaitu hanya sebesar 5,17%. Lambatnya pertumbuhan perekonomian Sumatera Barat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah (1) terjadinya musim kemarau yang relatif panjang sehingga menyebabkan terjadinya penurunan produksi padi secara drastis. (2) terjadinya keuangan yang melanda Indonesia sehingga menyebabkan terdepresiasinya rupiah dan berdampak terhadap menurunnya nilai tambah sektor industri pengolahan dan sektor bangunan/konstruksi.

Untuk itu upaya dan kerja keras Pemerintah Daerah serta masyarakat dunia usaha untuk menjalankan roda perekonomian daerah dalam usaha pengembalian dan peningkatan pertumbuhan kembali yang telah terpuruk sebagai akibat dampak krisis ekonomi sangat dibutuhkan.

2. Kredit Usaha Kecil di Sumatera Barat

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, maka untuk sampai kepada suatu kesimpulan mengenai hubungan antara besarnya jumlah KUK yang disalurkan dalam suatu sektor ekonomi dengan kinerja setiap sektor perekonomian terlebih dahulu akan dianalisa pengalokasian KUK persektor perekonomian tersebut. Data mengenai kinerja perekonomian suatu daerah bisa terlihat dalam jumlah Produk Domestik Regional Bruto daerah yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Sumatera Barat. KUK yang disalurkan untuk setiap sektor ekonomi dalam perekonomian yang ada terdiri dari KI, KMK dan KK dari semua jenis perbankan yang ada di Sumatera Barat

(bank pemerintah, bank swasta dan BPR). Secara umum, tabel 3 akan memperlihatkan bagaimana perkembangan PDB dan KUK di Sumatera Barat dalam tahun analisis.

Tabel 3
Perkembangan Jumlah PDB dan KUK di Sumatera Barat
Tahun 1993 – 1997

Tahun	PDB		KUK	
	Jumlah (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (Persentase)	Jumlah (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (Persentase)
1993	6.027.054	6,95	573.307	40,14
1994	6.475.856	7,45	745.727	30,06
1995	7.054.198	8,93	843.344	13,09
1996	7.605.546	7,82	1.002.202	18,85
1997	7.998.700	5,17	1.344.330	34,13

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka, Beberapa Terbitan
Perkembangan Ekonomi Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat, Beberapa Edisi

Tabel 3 memperlihatkan bahwa secara umum perkembangan jumlah KUK jauh lebih tinggi daripada perkembangan PDB Sumatera Barat, dimana KUK tumbuh secara rata-rata selama kurun waktu 1993 – 1997 sebesar 23,75%, sedangkan perekonomian Sumatera Barat hanya mampu tumbuh sebesar 5,82%. Pertumbuhan KUK paling besar terlihat terjadi pada tahun 1993-1994, dimana pemberian KUK untuk Sumatera Barat bergerak diatas 30%. Dua tahun berikutnya, pemberian KUK mengalami penurunan dan selanjutnya meningkat kembali diatas 30%. Peningkatan pemberian KUK pada tahun 1997 ini dirancang sebagai usaha membantu usaha kecil dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat terjadinya krisis perekonomian di Indonesia.

Guna dapat melihat bagaimana pengalokasian KUK di Sumatera Barat, pada tabel akan digambarkan persentase alokasi KUK pada tahun 1993 - 1997

Tabel 4
Alokasi Kredit Usaha Kecil (KUK)
Menurut Sektor Ekonomi Di Propinsi Sumatera Barat
Tahun 1993 -1997
(%)

Sektor Alokasi	Tahun				
	1993	1994	1995	1996	1997
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	3,11	3,61	10,08	12,49	17,45
Pertambangan	0,04	0,16	0,07	0,08	0,07
Perindustrian	2,36	1,99	1,60	1,86	1,50
Listrik, gas dan air	0,12	0,10	0,09	0,03	0,05
Konstruksi	3,11	2,40	1,52	2,09	1,73
Perdagangan, restoran dan hotel	38,31	41,49	16,86	24,59	20,95
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	15,07	12,12	11,97	10,79	8,94
Jasa-jasa	5,09	3,64	2,43	2,38	2,80
Lain-lain	33,73	34,52	55,38	45,70	46,51
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Perkembangan Ekonomi Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat, Beberapa Edisi (BI)

Untuk lebih memahami pengalokasian KUK terhadap sektor perekonomian di Sumatera Barat maka disini akan dianalisa dalam bentuk persentase. Persentase pemberian KUK perbankan melalui ketiga jenis perbankan diatas menunjukkan kenaikan yang bervariasi selama periode 1993 sampai dengan 1997. Pada periode awal tahun analisa yaitu periode 1993, persentase KUK yang terbesar dialokasikan untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel yaitu sebesar 38,310% dan persentase yang terkecil dialokasikan untuk sektor pertambangan (0,038%). Urutan selanjutnya mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah: bank dan lembaga keuangan (sektor ekonomi lain-lain), sektor ekonomi pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, lain-lain, jasa-jasa (dunia usaha dan sosial), pertanian, perburuan dan sarana pertanian, konstruksi, perindustrian, serta listrik, gas dan air.

Periode kedua analisa tahun 1994 alokasi KUK paling besar disalurkan pada perdagangan, restoran dan hotel (41,486%) disusul oleh sektor ekonomi lain-lain (bank

dan lembaga keuangan), jasa-jasa (dunia usaha dan sosial), pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, pertanian, perburuan dan sarana pertanian, konstruksi, perindustrian dan pertambangan. Sektor ekonomi yang paling sedikit menerima alokasi KUK pada periode ini adalah listrik, gas dan air (0,096%). Pertumbuhan penyaluran KUK pada periode 1994 adalah 0,231%.

Analisa selanjutnya dilakukan pada periode 1995 dengan terjadinya peningkatan alokasi KUK yang cukup berarti pada beberapa sektor ekonomi. Salah satu sektor yang mengalami kenaikan penyaluran KUK adalah pertanian, perburuan dan sarana pertanian. Persentase yang terbesar tetap disalurkan kepada sektor ekonomi lain-lain (bank dan lembaga keuangan) sebesar 55,336% dan yang paling sedikit disalurkan pada pertambangan (0,072%). Urutan selanjutnya dari yang terbesar sesudah sektor ekonomi lain-lain adalah perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, pertanian, perburuan dan sarana pertanian, jasa-jasa (dunia usaha dan sosial), perindustrian, konstruksi serta listrik, gas dan air. Pertumbuhan KUK yang disalurkan pada periode ini adalah sebesar 0,116%.

Periode berikutnya yaitu pada tahun 1996, pengalokasian KUK yang terbesar masih tetap disalurkan kepada sektor ekonomi lain-lain (bank dan lembaga keuangan) sebesar 45,697% diikuti oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel, pertanian, perburuan dan sarana pertanian, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, jasa-jasa (dunia usaha dan sosial), konstruksi, perindustrian, pertambangan, penyaluran yang paling kecil adalah untuk listrik, gas dan air (0,032%). Pertumbuhan KUK yang disalurkan pada periode ini adalah sebesar 0,159%.

Analisa terakhir pada tahun 1997, secara umum mempunyai komposisi penyaluran KUK yang sama dengan periode sebelumnya (tahun 1996). KUK terbesar disalurkan untuk sektor ekonomi lain-lain (bank dan lembaga keuangan, 46,513%) dan yang paling sedikit disalurkan kepada sektor ekonomi berupa listrik, gas dan air (0,054%). Urutan selanjutnya dari komposisi penyaluran KUK (mulai dari yang terbesar sampai terkecil) adalah perdagangan, restoran dan hotel, pertanian, perburuan dan sarana pertanian, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, jasa-jasa (dunia usaha dan social), konstruksi, perindustrian, dan pertambangan. Penyaluran KUK untuk sektor-sektor ekonomi yang ada dalam PDRB Sumatera Barat pada tahun terakhir analisa ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,254%.

Secara umum pertumbuhan penyaluran KUK dari tahun 1993 sampai tahun 1997 yang terus menerus mengalami peningkatan yang cukup besar dari jumlah KUK yang disalurkan adalah pada sektor ekonomi pertanian, perburuan dan sarana pertanian. Peningkatan dan penurunan penyaluran KUK yang bervariasi dapat dilihat pada sektor ekonomi lain-lain (bank dan lembaga keuangan), perdagangan, hotel dan restoran. Penurunan penyaluran KUK pada periode yang sama dengan persentase yang semakin menurun adalah pada pengangkutan, pergudangan dan komunikasi. Untuk sektor ekonomi lainnya selama tahun 1993 sampai 1997 mengalami pertumbuhan yang bervariasi. Penyaluran KUK untuk sektor-sektor ekonomi yang ada dalam PDRB Sumatera Barat dari tahun 1993 sampai tahun 1997 mengalami pertumbuhan sebesar 0,573%.

Pola pengalokasian KUK di Sumatera Barat dari tahun 1993 sampai tahun 1997 mengalami pergeseran dari sektor ekonomi non produktif seperti pengangkutan,

perdagangan dan komunikasi ke sektor ekonomi produktif diantaranya adalah sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian. Keadaan ini merupakan gambaran bahwa berdasarkan pangsa menurut jenis penggunaan kredit dan laju pertumbuhannya sejalan dengan tujuan utamanya yaitu untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Disamping itu pengalokasian KUK yang disalurkan amat berkaitan dengan karakteristik usaha-usaha mikro dan kecil di daerah yang umumnya terbatas permodalannya.

Temuan Penelitian

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, ternyata penyaluran KUK di Sumatera Barat oleh perbankan memperlihatkan hasil berikut. Penyaluran terbesar dilakukan oleh bank umum dan yang paling sedikit disalurkan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Sementara untuk komposisi pemberian KUK terhadap sektor perekonomian di Sumatera Barat, paling tinggi diserap oleh sektor ekonomi lain-lain (bank dan lembaga keuangan) dan paling sedikit diserap oleh sektor listrik, gas dan air.

Dari seluruh sektor-sektor ekonomi yang ada pada indikator kinerja perekonomian provinsi Sumatera Barat (PDRB), hasil analisa menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) sektor ekonomi yang menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan jika dilakukan peningkatan alokasi KUK terhadap sektor perekonomian tersebut. Empat sektor tersebut adalah sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian dengan derajat kepercayaan 83%, sektor perindustrian dengan derajat kepercayaan 77%, sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi dengan derajat kepercayaan 99% dan sektor lain-lain (Bank dan Lembaga Keuangan) dengan derajat kepercayaan 89%.

Derajat kepercayaan ini menunjukkan jika terjadi peningkatan penyaluran KUK oleh bank, maka akan meningkatkan pertumbuhan kinerja perekonomian pada sektor-sektor tersebut.

Namun secara keseluruhan, alokasi KUK terhadap sektor-sektor ekonomi yang ada dalam PDRB propinsi Sumatera Barat mempunyai hubungan yang positif dengan peningkatan kinerja perekonomian selama tahun analisa. Dari hasil perhitungan regresi berganda diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 4.653.496,2 + 2,64 X_1$$

Hasil penemuan empiris dari persamaan atau model yang digunakan memperlihatkan bahwa penyaluran KUK kepada sektor-sektor ekonomi yang ada dalam sektor-sektor perekonomian Sumatera Barat, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja perekonomian pada tahun analisa yaitu dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1997. Koefisien estimasi (2,64) menunjukkan bahwa (variabel lainnya konstan) jika terjadi peningkatan penyaluran KUK terhadap sektor-sektor ekonomi yang ada dalam perekonomian Sumatera Barat akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja perekonomian pada tahun tersebut. Dengan dasar demikian, dapat dianggap bahwa jika terjadi peningkatan jumlah KUK sebesar 1 juta rupiah maka akan terjadi peningkatan sebesar 2,64 juta pada PDB Sumatera Barat dengan dengan signifikan pada derajat kepercayaan 92%.

Tabel 5

Tabulasi Hasil Regressi KUK Terhadap PDB Sumatera Barat

Variabel Bebas	Koefisien
Konstanta	4.653.496,2
X_1	2,64
R^2	92 %
DW-Statistik	1,8376
Jumlah Observasi	5

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa ternyata penyaluran kredit usaha kecil (KUK) yang dilakukan oleh bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat terhadap sektor-sektor ekonomi yang ada di Sumatera Barat, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perekonomian Sumatera Barat. Hasil temuan empiris memperlihatkan bahwa kontribusi KUK terhadap kinerja perekonomian Sumatera Barat relatif cukup besar. Hal ini relevan dengan perkembangan usaha kecil dan mikro yang belakangan ini mendapatkan perhatian dari pemerintah karena perannya yang semakin penting dalam struktur perekonomian daerah.

Walaupun komposisi penyaluran KUK berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perekonomian Sumatera Barat, namun terdapat variabel-variabel lain yang juga turut mempengaruhi kemampuan usaha kecil dan mikro yang dibiayai tersebut agar dapat memberikan hasil optimal dalam menunjang kinerja perekonomian secara keseluruhan. Variabel-variabel tersebut antara lain bidang pemasaran dari hasil-hasil produksi usaha kecil dan mikro yang ada mencakup kebijaksanaan pemasaran penelitian pasar, penyaluran/pengadaan, manajemen penjualan serta iklan/promosi, terjaminnya ketersediaan bahan baku dan keahlian dari pengusaha kecil dalam mengelola usahanya. Untuk itu disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan guna melihat pengaruh variabel lainnya, disamping ketersediaan modal yang dimiliki oleh pengusaha kecil yang diperoleh melalui KUK yang disalurkan oleh bank, terhadap kinerja perekonomian Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (1993-1997), *Sumatera Barat Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Padang.
- Bank Indonesia (1998), *Kumpulan Ketentuan Kredit Program dan Bantuan Teknis Bank Indonesia*, Urusan Kredit Bank Indonesia, Jakarta.
- Bank Indonesia (1998), *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat*, Bank Indonesia Padang, Padang.
- Bank Indonesia (1993-1997), *Perkembangan Ekonomi Keuangan Daerah*, Bank Indonesia Padang, Padang.
- Howlin et. al (1990), *Financial Analysis*, 2nd edition, Mc Graw Hill Inc., Singapore.
- Dahlan Siamat (1995), *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta.
- Graddy et. al. (1985), *Commercial Banking and The Financial Services Industry*, Virginia, Reston Publishing Inc., USA.
- Hempel et. al (1983), *Bank Management; Text and Cases*, John Willey & Sons Inc., New York (USA).
- Keown et. al. (1996), *Basic Financial Management*, 7th edition, Prentice Hall Inc., Singapore.
- Lembaga Penelitian Unand (1994), *Baseline Economic Survey Propinsi Sumatera Barat (Prioritas Pengembangan Usaha Kecil di Sumatera Barat)*, Padang.
- Lyddleton, D.R. (1995), *The Essence of Financial Management*, Prentice Hall Inc., London.
- Seed et. al. (1989), *Commercial Banking*, 4th edition, Prentice Hall Inc., Singapore.
- Radono Sukirno (1996), *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, edisi kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Samuelson et. al. (1994), *Ekonomi*, edisi keduabelas (terjemahan), Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Saley et. al. (1965), *Modern Small Industry for Developing Countries*, Mc Graw Hill Inc., Tokyo.
- Steinhoff, Dan (1982), *Small Business Management Fundamentals*, 3rd edition, Mc Graw Hill Inc., Singapore.
- Shruddin (1992), *Teori Ekonomi Makro*, Universitas Andalas, Padang.